

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi menjadi medium intelektual dan laboratorium peradaban. Perguruan tinggi merupakan instrumen satuan pendidikan. Perguruan tinggi menyelenggarakan giat dan medium pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Orientasi dari pendidikan yang diimplementasikan di perguruan tinggi ini diberikan identitas dengan nomenklatur Tri Dharma Perguruan Tinggi (Leuwol et al., 2020). Freire (2019), memanifestasikan pemikirannya yang tersegmentasi pada konseptual dan proses pendidikan harus memperbanyak medium yang bersifat dialogis. Pertentangan pemikiran antara pembelajar dengan tenaga pendidik, dan menjadikan variabel humanisme menjadi sentralisasi vital dalam mengimplementasikan berbagai metodologis dalam dunia pendidikan. Efektivitas pendidikan akan berjalan ideal ketika terjadinya integrasi yang koheren dalam lingkup civitas akademika perguruan tinggi yang bersifat struktural dan fungsional dalam mewujudkan orientasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Lian, 2019).

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peran yang sangat sentral dalam memberikan implikasi yang kontributif dalam kehidupan sosial. Perguruan tinggi merupakan instrumen pendidikan yang menjadi promotor untuk meningkatkan dan mengakselerasi ilmu pengetahuan dan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Penelitian ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pengajaran yang bersifat dialogis antara mahasiswa dan dosen menjadi faktor yang memberikan dampak signifikan untuk mengimplementasikan orientasi perguruan tinggi yang termanifestasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Wihardjo et al., 2024). Genealogi perjalanan perguruan tinggi memiliki budaya akademik dengan karakteristik yang terus dikonservasi oleh para akademisi. Kultural akademik dapat diklasifikasikan tentang sudut pandang akademik, motivasi akademik, etika akademik, iklim dan ekosistem akademik.

Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif, kultural akademik dapat terkonstruksi dan mampu mewujudkan kemandirian, keterbukaan, keragaman, dan kreativitas yang diimplementasikan oleh civitas akademika di

perguruan tinggi (Wihardjo et al., 2024). Dalam mengakselerasi perkembangan kultural akademik, terkhusus pada mahasiswa dapat dilihat dari kebiasaan untuk membaca, melaksanakan kajian ilmiah, dan aktif berkegiatan dalam segmen internal dan eksternal perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu mengorkestrasi aktivitas yang menjadi stimulus dalam mewujudkan kultural akademik dan medium dialogis yang mampu menghasilkan civitas akademika yang jauh dari pengkhianatan akademik seperti politisasi pendidikan dan melanggar kode etik perguruan tinggi.

Interaksi menjadi hal fundamental dalam berlangsungnya suatu proses transformasi dan diseminasi pengetahuan terkhusus dalam lingkup pendidikan (perguruan tinggi), dan komunikasi menjadi instrumen utama dalam proses interaksi tersebut. Mengimplementasikan komunikasi secara efektif akan terjalin suatu integrasi dalam melakukan proses penyampaian dan mengartikulasikan sebuah pesan (Hamama & Nurseha, 2023). Dalam berlangsungnya proses dan konseptual dalam ranah pendidikan terkhusus perguruan tinggi tentunya mempunyai korelasi dengan berbagai kebijakan dan ketetapan yang dikelola oleh spektrum perpolitikan (Siagian et al., 2024).

Spektrum politik dan pendidikan akan selalu terintegrasi. Berbagai perspektif tentang pendidikan dan politik masih banyak menimbulkan bias makna dan membuat berbagai entitas ambigu dalam mengartikulasikan integrasi antara sistem politik dengan dunia pendidikan terkhusus perguruan tinggi (Sutrisman, 2018). Kebijakan dan ketetapan yang dimanifestasikan melalui medium perpolitikan, tentunya akan sangat berpengaruh ke berbagai lini sektor kehidupan. Dalam segmentasi pendidikan, sistem politik banyak memberikan pengaruh dan menghadirkan berbagai orientasi yang tentunya linear dengan arah gerak dari produk politik yang diformulasikan. *Michael W. Apple* mengejawantahkan bahwasanya sistem politik terdiseminasi melalui medium dan kelembagaan pendidikan yang berorientasi terhadap kebijakan dan ketetapan politik atau sistem kekuasaan (Asdrayany et al., 2023).

Tentunya kebijakan dan regulasi yang diimplementasikan di perguruan tinggi menjadi preferensi dalam ekosistem akademik di suatu perguruan tinggi. Salah satu aspek yang terpenting dan menjadi landasan fundamental yang harus diaplikasikan oleh perguruan tinggi ialah terkait instrumen kebebasan berekspresi. Regulasi perguruan tinggi tentang kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada pasal 8 ayat (1) UU Dikti mengejawantahkan terkait “dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan” (Susanti, 2020). UU Dikti mengatur kebebasan akademik mahasiswa dan kewajiban perguruan tinggi untuk melindungi dan memfasilitasi kebebasan berekspresi. Kebebasan akademik merupakan hak fundamental yang menjadi instrumen vital terhadap dosen, mahasiswa, dan pegawai (civitas akademika) untuk belajar, mengajar, melakukan penelitian, dan menjalankan tugasnya tanpa harus takut untuk mendapatkan intervensi dari pihak kampus atau perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai insan akademis dan kaum intelektual harus memahami peran dan fungsi tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang tertuang dalam regulasi dan kebijakan suatu kampus. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dan berekspresi dengan memprioritaskan penalaran dan moralitas serta bertanggung jawab sesuai dengan kultural akademik. Tertuang dalam pasal 8 ayat (3) UU Dikti yang berbunyi “pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab civitas akademika yang wajib untuk dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.

Merujuk dari berbagai sumber terkait praktik berpolitik di perguruan tinggi dan aspek kebebasan berekspresi. Mahasiswa harus mampu menjadi promotor transformatif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kebebasan berekspresi harus menjadi pilar dan prinsip yang harus selalu terintegrasi dalam diri mahasiswa. Menilik suatu fenomena dan gejolak perpolitikan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998, yang menjadi promotor dalam demonstrasi tersebut adalah mahasiswa yang terhimpun dalam berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mahasiswa dan masyarakat sipil bersatu untuk menyampaikan aspirasi atas gejolak yang terjadi pada masa tersebut. Gerakan yang dieskalasikan oleh mahasiswa tahun 1998 merupakan salah satu titik kulminasi praktik politik yang diorkestrasikan dan diimplementasikan oleh mahasiswa dalam menyikapi keadaan sosial politik Indonesia kala itu. Landasan fundamental yang membuat mahasiswa melakukan suatu eskalasi gerakan yang sangat besar di Indonesia terpengaruh oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia (Rohmah & Millata, 2023).

Keberhasilan *social movement* pada tahun 1998 (era reformasi) yang dipromotori oleh mahasiswa merupakan salah satu instrumen vital dalam praktik perpolitikan di perguruan tinggi. Proses pergerakan yang diinisiasikan oleh mahasiswa awalnya hanya berkecamuk dalam internal kampus atau perguruan tinggi di setiap daerah yang ada di Indonesia. Pada akhirnya dengan berbagai tuntutan dan aspirasi terkait permasalahan dan gejolak bangsa yang tak kunjung menemui jawaban dan jalan keluar. Mahasiswa mengonstruksi eskalasi gerakan yang terdiseminasi dalam berbagai lini sektor termasuk civitas akademika dan masyarakat sipil. Mahasiswa yang mempunyai peran dan fungsi untuk menjadi agen perubahan dan menjaga stabilitas tatanan kehidupan sosial masyarakat, bergerak dan menghimpun suatu kekuatan yang besar dengan seluruh entitas untuk bergerak dalam menyikapi fenomena dan gejolak bangsa pada saat itu. Gerakan reformasi tahun 1998 yang diinisiasikan oleh mahasiswa membuahkan hasil dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun (Rohmah & Millata, 2023). Begitu besarnya peran dan fungsi dari mahasiswa sebagai aktor perubahan, karena mahasiswa merupakan entitas yang memiliki kompetensi dengan pendidikan yang diperoleh di perguruan tinggi (aktor intelektual). Mahasiswa menjadi promotor dalam mengonstruksi kondisi sosial politik, dan gerakan reformasi 1998 sebagai representatif kulminasi dari praktik berpolitik di perguruan tinggi.

Berbagai praktik politik tentunya menghiiasi proses konstruksi realitas sosial yang ada di perguruan tinggi. Realitas sosial merupakan produk dari interaksi sosial dan proses komunikasi (Hadiwijaya, 2023b). Konstruksi realitas sosial tersegmentasi tentang pemahaman realitas dibentuk oleh interaksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi dan terpengaruh dengan cara dan proses menginterpretasikan suatu proses komunikasi. Konstruksi realitas sosial terintegrasi dengan asumsi individu yang merasakan pengalaman dengan mengonstruksi model interaksi sosial dan sistem komunikasi (Hadiwijaya, 2023b). Oleh karena itu, konstruksi realitas sosial bukan hanya sekadar tersentralisasi dalam aspek dan entitas objektif, tetapi terkonstruksi melalui interaksi sosial dan proses komunikasi.

Landasan teoritis tentang konstruksi sosial yang diejawantahkan oleh (Berger & Luckman, 1991), dalam instrumen yang dimanifestasikan dalam tiga klasifikasi yaitu tentang konstruksi realitas sosial eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi

terintegrasi dengan konteks penelitian tentang konstruksi realitas sosial praktik berpolitik di kampus pada organisasi mahasiswa guna memahami terkait praktik berpolitik dalam lingkup perguruan tinggi mampu mengkonstruksi realitas sosial di perguruan tinggi dan di Universitas Telkom sesuai dengan subjek penelitian yang akan diteliti.

Pada perguruan tinggi (kampus), secara ideal praktik berpolitik harus berorientasi untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika terkait perpolitikan dan menjadi stimulus untuk berpartisipasi dan menjadi kontributor dalam giat perpolitikan. Berbanding terbalik, jika praktik politik dijadikan sebagai komoditas untuk memobilisasi berbagai entitas demi kepentingan golongan atau beberapa komunal, hal ini akan membuat terjadinya degradasi intelektualitas maupun moralitas dalam batang tubuh perguruan tinggi tersebut (Hefni, 2018). Perguruan tinggi (kampus) harus mampu menjadi pilar dan preferensi dalam upaya mereduksi bias makna tentang otoritas kebijakan yang di manifestasikan dalam ekosistem praktik berpolitik yang diaplikasikan.

Konstruksi realitas sosial civitas akademika terkait peran dan fungsi praktik berpolitik yang diimplementasikan di lembaga pendidikan terkhususnya perguruan tinggi menjadi hal fundamental yang harus tersentralisasi dalam ekosistem kehidupan kampus. Ketika praktik politik tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya (ideal) akan menimbulkan berbagai polemik dan dilema dalam mengartikulasikan pemahaman politik yang ada dalam ekosistem kampus (Hefni, 2018).

Praktik politik yang implementasikan dalam lingkup perguruan tinggi harus berorientasi kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memberikan aksesibilitas kepada seluruh civitas akademika untuk saling menjalankan hak dan kewajibannya. Tentu, dengan instrumen dan sistem perpolitikan yang ideal akan memberikan dampak dan pengaruh dalam berbagai sektor seperti kebijakan serta otoritas perguruan tinggi, dan metode yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Seperti yang diejawantahkan oleh Paulo Freire dalam “Pendidikan Kaum Tertindas” bahwasanya perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang bertugas sebagai medium yang memberikan pencerdasan harus memberikan aksesibilitas seluas-luasnya untuk melakukan pertentangan pemikiran, dan memperbanyak ruang dialogis sebagai medium yang diformatkan untuk melakukan transformasi dan diseminasi gagasan

yang berorientasi untuk mewujudkan tujuan dari perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan. Pengimplementasian realitas sosial harus menjadi salah satu pilar yang disentralisasikan oleh lembaga pendidikan guna memberikan aksesibilitas kepada civitas akademika untuk mengakselerasi dan mengeksplorasi kemampuan dan kompetensi dirinya melalui proses yang dimanifestasikan dalam interaksi dan realitas sosial di perguruan tinggi atau kampus (Suci, 2017).

Terjadi sebuah fenomena yang berbeda dan keluar dari konsepsi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi medium intelektual pada Organisasi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. BEM FISIP UNAIR dibekukan oleh rektor Universitas Airlangga karena mengirimkan karangan bunga yang redaksinya memberikan satir untuk Prabowo-Gibran.



Gambar 1. 1 Karangan Bunga Prabowo-Gibran Oleh BEM FISIP UNAIR

Sumber: Media Tempo (Nurani, 2024)

Karangan bunga satir tersebut memanifestasikan redaksi yang tertuang dengan tulisan “Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi”. Pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 09.30 WIB, pimpinan BEM FISIP UNAIR menghadiri pemanggilan dari Komisi Etik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sore harinya BEM FISIP UNAIR mendapatkan email dari pihak dekanat tentang pembekuan BEM FISIP UNAIR. Aspek yang

membuat surat pembekuan itu dikeluarkan, karena penggunaan narasi dalam karangan bunga tidak sesuai dengan etika dan budaya akademik di lingkungan kampus (Nurani, 2024). Fenomena pembungkaman kebebasan berekspresi yang dialami oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga merepresentasikan terjadinya dekadensi ruang berekspresi di lingkup kampus atau perguruan tinggi yang seharusnya menjadi laboratorium dialogis dalam melakukan pertentangan pemikiran.

Dengan berbagai penjelasan yang telah mengejawantahkan secara khusus segmentasi perpolitikan di perguruan tinggi, mulai dalam aspek pendidikan, komunikasi, dan pada akhirnya mengkonstruksi realitas sosial di teritorial perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut perlu dielaborasi secara efektif guna mengkonstruksi realitas sosial secara ideal. Kondisi *socio-cultural* yang efektif di perguruan tinggi akan mampu untuk mengorkestrasikan suatu kultural dan ekosistem berpolitik yang efektif dalam lingkup perguruan tinggi (Gettar et al., 2023). Untuk menunjang dan mengoptimalkan orientasi pendidikan politik yang ideal di sebuah lembaga pendidikan terkhusus perguruan tinggi tentu membutuhkan instrumen kebebasan berekspresi sebagai pilar utama dan menjadi sentralisasi dalam melakukan diseminasi dan memanifestasikan berbagai perspektif yang didapatkan dalam segmen praktik berpolitik di perguruan tinggi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian yang fokus pada konstruksi realitas sosial dalam praktik berpolitik di kampus. Organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom yang selanjutnya disingkat menjadi BEM KEMA Universitas Telkom menjadi medium yang akan diteliti. Kondisi objektif yang terjadi di Universitas Telkom per hari ini terjadinya *vacuum of power* pada BEM KEMA Universitas Telkom sedari tahun 2021 akhir. Hal ini dapat diartikulasikan dengan keadaan atau kondisi kekosongan kekuasaan, ketiadaan BEM KEMA Universitas Telkom banyak menimbulkan berbagai kesulitan dalam berbagai aspek terkhusus yang dirasakan oleh mahasiswa di Universitas Telkom itu sendiri. Dalam aspek advokasi secara khusus, tidak ada medium yang menjadi representatif untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan civitas akademika Universitas Telkom. Tanpa adanya BEM KEMA Universitas Telkom, menutup ruang mahasiswa untuk mengakselerasi kompetensinya untuk berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa

tingkat Universitas. Karena di Universitas Telkom yang terdiri atas tujuh Fakultas, hanya tiga fakultas yang memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas yaitu BEM KEMA FKS Universitas Telkom, BEM KEMA FEB Universitas Telkom, dan BEM KEMA FIK Universitas Telkom. Hal ini diperoleh peneliti melalui riset dan observasi secara langsung melihat kondisi sosial politik yang ada di Universitas Telkom. Oleh karena itu, maka penting untuk meneliti dari sudut pandang praktik berpolitik civitas akademika Universitas Telkom tanpa adanya BEM KEMA Universitas Telkom.

Sebagai pendahulu tinjauan pustaka (*literature review*) yang tentunya akan peneliti ejawantahkan secara komprehensif di sub bab selanjutnya, penelitian terkait konstruksi realitas sosial dalam praktik berpolitik di kampus belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Konteks penelitian terdahulu yang linear dengan penelitian yang akan dilakukan, pernah diteliti oleh (Rahmawati, 2022) tentang peranan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik. Ia berpendapat bahwa organisasi kemahasiswaan mampu memberikan stimulus akan rasa nasionalisme mahasiswa. (Rachman et al., 2023) melakukan penelitian tentang keterampilan abad 21 dalam perspektif sosial dan politik mempersiapkan generasi muda untuk tantangan kontemporer. Ia berpendapat bahwasanya pendidikan harus memberikan implikasi harus lebih meluas dan harus terdapat ruang dialogis dalam proses. (Nasution et al., 2024) meneliti tentang pembelajaran dan konstruktivis sosial. Ia berpendapat bahwa medium pembelajaran dan konstruktivis sosial tersentralisasi terhadap peran bahasa, budaya, dan interaksi sosial.

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu penelitian tentang konstruksi realitas sosial, praktik dan pendidikan politik. Namun, penelitian terdahulu masih terlalu luas terkait subjek penelitian dan belum ada yang dielaborasikan tentang konstruksi realitas sosial dan praktik berpolitik di kampus. Penelitian terdahulu yang linear dengan aspek konstruksi realitas sosial dan praktik berpolitik belum ada yang terfokus terhadap praktik berpolitik di perguruan tinggi atau kampus dengan menggunakan organisasi mahasiswa sebagai medium dan instrumen penelitiannya. *Research Gap* pada penelitian ini tersentralisasi pada kurangnya pemahaman yang komprehensif dan dialektis tentang bagaimana praktik berpolitik di lingkungan perguruan tinggi

dikonstruksi melalui medium interaksi sosial (melalui realitas sosial eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi), serta bagaimana proses praktik berpolitik ini dimediasi secara spesifik dengan konsep *scaffolding*.

Merujuk terhadap penelitian terdahulu yang belum ada melakukan penelitian yang berfokus pada konstruksi realitas sosial tentang praktik berpolitik di perguruan tinggi studi pada organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji dan mengetahui konstruksi realitas sosial tentang praktik berpolitik di kampus pada Organisasi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Telkom. Pada akhirnya peneliti mengenalkan penelitian ini dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui lebih mendalam tentang penelitian ini guna memberikan saran, evaluasi, dan rekomendasi terhadap berbagai entitas yang linear dengan konsensus penelitian konstruksi realitas sosial dan praktik berpolitik di perguruan tinggi. Peneliti mempunyai orientasi atau tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana proses dan konseptual dari praktik berpolitik yang diimplementasikan dalam perguruan tinggi. Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan survei kepada berbagai entitas, terkhusus civitas akademika yang ada di Universitas Telkom terkait praktik politik yang ada di kampus dan pada organisasi kemahasiswaan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom. Merujuk kepada latar belakang yang sudah diejawantahkan, maka penelitian ini akan meneliti tentang **“Konstruksi Realitas Sosial Tentang Praktik Berpolitik di Perguruan Tinggi Studi Pada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana kondisi **“Konstruksi Realitas Sosial Tentang Praktik Berpolitik di Perguruan Tinggi Pada Organisasi Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom”** dengan menggunakan landasan teoritis konstruksi realitas sosial.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di formulasikan terkait kondisi Konstruksi Realitas Sosial Praktik Berpolitik di Universitas Telkom menggunakan landasan teoritis konstruksi realitas sosial. Maka pertanyaan penelitian berdasarkan

tujuan yang telah diuraikan adalah: **Bagaimana Konstruksi Realitas Sosial Tentang Praktik Berpolitik yang terjadi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Telkom?**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dan membantu memperkaya khazanah Ilmu Komunikasi terkait riset tentang konstruksi realitas sosial dan praktik berpolitik di perguruan tinggi.
2. Dapat dijadikan referensi mengenai kompleksitas praktik berpolitik di perguruan tinggi melalui lensa konstruksi realitas sosial mengenai perilaku politik mahasiswa, dinamika organisasi kemahasiswaan, serta relasi kuasa di lingkungan kampus.
3. Dapat menjadi katalisator dalam memperluas teori dalam studi komunikasi politik dengan analisis empiris mengenai konstruksi realitas sosial pada konteks Badan Eksekutif Mahasiswa yang terintegrasi secara komprehensif dalam pengembangan konseptual praktik berpolitik di kalangan mahasiswa terkonstruksi dan dipertahankan melalui interaksi sosial.
4. Penelitian diharapkan mampu memberikan data dan kajian baru tentang praktik berpolitik dan kehidupan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi pasca reformasi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat dan pengetahuan terkait analisis komunikasi politik terhadap konstruksi realitas sosial dan pendidikan politik di perguruan tinggi.
2. Dapat memberikan wawasan komprehensif tentang peran konstruksi realitas sosial dan komunikasi politik dalam mengonstruksi pendidikan politik di perguruan tinggi.
3. Menjadi wadah dalam mengakselerasi ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi terkait bagaimana pendidikan politik menjadi instrumen vital di lembaga pendidikan.
4. Menjadi rujukan dan referensi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dalam melakukan praktik politik di kampus.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilangsungkan dan dimulai di bulan Januari 2024 dan selesai hingga bab 5 pada bulan Mei 2025. Secara lengkap dan detail tahapan dan waktu observasi dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Waktu dan Periode Penelitian

NO	Aktivitas Penelitian	2025				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1.	Menentukan Topik Penelitian					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Proses Analisis Data					
6.	Pendaftaran Sidang					
7.	Sidang Skripsi					

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di teritorial Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.